

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA
OUTSOURCING, PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DAN
PERUSAHAAN PENGGUNA JASA
(Studi di RSUD Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ZAENAB AL MUBAROKAH

C100150225

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SISTEM
OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING, PERUSAHAAN
PENYEDIA JASA DAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA**

(Studi di RSUD Kota Surakarta)


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ZAENAB AL MUBAROKAH
NIM: C100150225

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing


(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA
SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING,
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DAN
PERUSAHAAN PENGGUNA JASA
(Studi di RSUD Kota Surakarta)**

Oleh :

ZAENAB AL MUBAROKAH

NIM: C100150225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Desember 2018

Dewan Penguji

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Shalman Alfarizi, S.H., S.E., M.Kn

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIP. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ketlak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Desember 2018

Penulis



ZAENAB AL MUBAROKAH
C. 100.150.225

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SISTEM
OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING, PERUSAHAAN
PENYEDIA JASA DAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA
(Studi di RSUD Kota Surakarta)**

Abstrak

Perjanjian kerja sistem outsourcing terdiri dari beberapa pihak diantaranya yaitu pekerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa. Pekerja outsourcing mengikatkan diri dengan perusahaan penyedia jasa dalam bentuk perjanjian dimana pekerja outsourcing bekerja pada perusahaan penyedia jasa namun penempatan area kerja berada pada wilayah kerja perusahaan pengguna jasa yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan perusahaan penyedia jasa dalam bentuk perjanjian penyediaan tenaga kerja outsourcing pada perusahaan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing di RSUD Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan doktrinal (normatif). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa asas keseimbangan belum sepenuhnya diterapkan pada perjanjian kerja sistem outsourcing di RSUD Surakarta. Terdapat beberapa perusahaan penyedia jasa yang tidak membuat perjanjian tertulis dengan pekerja outsourcing. Mengenai hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa di RSUD Surakarta seharusnya demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemberi kerja yaitu RSUD Surakarta karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 59 UU Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : perjanjian kerja, sistem outsourcing, asas keseimbangan

Abstract

The outsourcing system work agreement consists of several parties including outsourcing workers, service provider companies and service user companies. Outsourcing workers tie themselves with service providers in the form of agreements where outsourcing workers work for service providers but the placement of work areas is in the work area of companies that service users who previously tied themselves to service provider companies in the form of outsourcing labor supply agreements with these companies. This study examines the application of the principle of balance in the outsourcing system work agreement in RSUD Surakarta. The research method used is descriptive research with a doctrinal approach (normative). The results of this study conclude that the principle of balance has not been fully applied in the outsourcing system work agreement in RSUD Surakarta. There are several service providers that do not make written agreements with outsourced workers. Regarding the working relationship between outsourcing workers and service providers in RSUD Surakarta, it should be for the sake of law to turn into a working relationship between outsourcing workers and employer companies, namely RSUD Surakarta because it is not in accordance with the provisions of Article 59 of the Manpower Act as stipulated in Article 66 (4).

Keywords: work agreement, outsourcing system, balance principle

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin pesat dan modernisasi semakin merambah dalam berbagai bidang kehidupan salah satunya yaitu dalam

bidang ketenagakerjaan. Modernisasi dalam bidang ketenagakerjaan memicu semakin banyaknya praktek ketenagakerjaan yang berdasarkan atas suatu ikatan perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja terwujud dalam beberapa bentuk sistem ketenagakerjaan diantaranya adanya sistem outsourcing dan sistem non outsourcing yang keduanya harus mewujudkan keadilan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian para pihak harus berpegang teguh pada asas-asas dalam perjanjian salah satunya yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas dimana kedua belah pihak mengetahui hal – hal yang harus dilakukan untuk menyeimbangi hal-hal yang mungkin akan terjadi.¹

Selain terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, asas keseimbangan juga merupakan salah satu asas perjanjian menurut hukum islam yang disebut pula dengan *Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*. Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba. Mengenai asas *Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah* tercermin pula pada ayat Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran), karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa kita harus adil dalam hal apapun termasuk dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang telah disetujui dalam perjanjian kerja antara pihak-pihak yang telah sepakat melaksanakannya.

Perjanjian outsourcing terdiri dari beberapa pihak diantaranya yaitu pekerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa. Pekerja outsourcing mengikatkan diri dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam bentuk suatu perjanjian dimana pekerja outsourcing bekerja pada perusahaan penyedia jasa outsourcing namun penempatan

¹ Dedi Ismatullah, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, hal. 107.

area kerja berada pada wilayah kerja perusahaan pengguna jasa outsourcing yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan perusahaan penyedia jasa dalam bentuk perjanjian penyediaan tenaga kerja outsourcing pada perusahaan tersebut. Dasar hukum pemberlakuan sistem outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang isinya menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan keadaan – keadaan dimana banyak terdapat ketidakseimbangan antara apa yang diterima dengan apa yang diberikan serta ketidakseimbangan dalam memikul resiko berkaitan erat dengan maraknya pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Berlakunya sistem outsourcing memicu adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja outsourcing yang cenderung tidak memiliki jenjang karir dan sulit untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagai wujud dari cita – cita bangsa Indonesia itu sendiri yang berkewajiban mewujudkan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, pemberlakuan sistem outsourcing justru menghambat perwujudan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia yang menjadi kewajiban negara sehingga dipertanyakan pula keterkaitan keberlakuan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian outsourcing yang menjadikan perlu adanya penelitian mendalam mengenai **“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING, PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA (Studi di RSUD Kota Surakarta)”**.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif. Penelitian ini meneliti apakah perjanjian outsourcing antara pekerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa di RSUD Kota Surakarta telah sesuai dengan perundang-undangan dan doktrin serta telah menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data terdiri dari data primer dan sekunder berupa data perjanjian kerja, wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing di RSUD Kota Surakarta

Pelaksanaan outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 64 sampai pasal 66, dasar pemberlakuan sistem outsourcing di Indonesia diatur dalam pasal 64 Undang – Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Untuk pasal 65 Undang – Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pelaksanaan outsourcing dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan, sedangkan mengenai pasal 66 Undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai pelaksanaan outsourcing dalam hal perjanjian penyedia jasa pekerja atau buruh.

Berkaitan dengan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk pelaksanaan Outsourcing di RSUD Kota Surakarta, perjanjian penyerahan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing telah dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Mengenai ketentuan pasal 66 ayat (1) untuk pelaksanaan outsourcing di RSUD Kota Surakarta digunakan dalam bidang jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa tenaga boga, jasa pengemudi dan jasa laundry, berbagai bidang jasa tersebut merupakan jasa penunjang namun berhubungan langsung dengan proses produksi, dimana untuk bidang jasa keamanan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan proses produksi di RSUD Kota Surakarta dalam hal tugas pokok dan fungsi tenaga keamanan RSUD Kota Surakarta yang bersentuhan langsung dengan pelayanan pasien dalam hal merupakan garda terdepan yang memberikan pelayanan pertama kepada pengunjung sebelum dilayani oleh petugas medis yaitu untuk pemberian informasi kepada pasien dan pengunjung, pemberian nomor antrian, pengecekan berkas pasien rawat jalan, penggantian gas O₂, penanganan pertama pada pasien gawat darurat untuk membawa pasien dari depan ruangan sampai pada pelayanan petugas medis dan penanganan pertama pada henti jantung pasien diluar pasien rawat inap karena tenaga keamanan juga dibekali pengetahuan-pengetahuan medis dalam hal penanganan pertama pasien henti jantung. Untuk bidang tenaga kebersihan juga merupakan jasa penunjang namun berhubungan langsung dengan proses produksi dimana petugas kebersihan di RSUD Kota Surakarta bersentuhan langsung dengan sarana dan prasarana proses produksi dan mempunyai resiko yang sama dengan tenaga medis dalam hal penularan virus apabila berhubungan langsung dengan pasien maupun alat medis dan ruangan pemberian tindakan

medis secara langsung, untuk bidang tenaga boga berhubungan langsung dengan aspek keberhasilan proses produksi dimana ketika tidak terdapat tenaga boga yang menyiapkan makanan yang sesuai dengan yang dianjurkan dokter kepada pasien maka tujuan proses produksi tidak akan tercapai. Untuk bidang jasa pengemudi berhubungan langsung dengan proses produksi dalam hal mengantar pasien untuk rujuk dan mengantar jenazah serta mengantar pegawai Rumah Sakit dalam hal perjalanan dinas terkait proses produksi perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta. Untuk bidang jasa laundry berhubungan langsung dengan proses produksi karena berhubungan langsung dengan sarana medis berupa pakaian pasien secara langsung dan memiliki resiko tertular penyakit sebagaimana tenaga medis ketika bersentuhan langsung dengan barang pasien demi tercapainya tujuan proses produksi di RSUD Kota Surakarta. Berdasarkan uraian tersebut, berkaitan dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pelaksanaan outsourcing di RSUD Kota Surakarta tidak sesuai dengan aturan pasal tersebut sebagaimana merupakan syarat pelaksanaan outsourcing penyedia jasa pekerja di Indonesia.

Mengenai pasal 66 ayat (2) pelaksanaan outsourcing di RSUD Kota Surakarta dilaksanakan dengan sistem lelang tiap tahun dan dengan pembaruan perjanjian kerja setiap tahunnya pada akhir masa perjanjian selama lebih dari 5x masa kerja sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

3.2 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa di RSUD Kota Surakarta

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa di RSUD Kota Surakarta diuraikan dalam empat bidang pekerjaan outsourcing diantaranya tenaga outsourcing bidang keamanan, tenaga outsourcing bidang kebersihan, tenaga outsourcing bidang tenaga boga dan tenaga outsourcing bidang pengemudi.

Asas keseimbangan merupakan salah satu asas dalam perjanjian dimana merupakan asas yang harus terdapat dalam perjanjian. Asas keseimbangan mencakup kesesuaian antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hukum perjanjian. Setiap pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Salah satu pihak dalam perjanjian berkewajiban melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan yang menjadi hak dari pihak lain dalam perjanjian begitu pula sebaliknya.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa keamanan kantor di RSUD Kota Surakarta dalam hal ini adalah PT. Alumada Artha Prima yang telah memenangkan lelang pada periode kedua dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pekerja keamanan dengan PT. Alumada Artha Prima. Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan penyedia yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di RSUD Kota Surakarta.

3.3 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Perusahaan Penyedia Jasa dengan Perusahaan Pengguna Jasa di RSUD Kota Surakarta

Mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pengguna jasa di RSUD Kota Surakarta diuraikan dalam empat bidang pekerjaan outsourcing diantaranya tenaga outsourcing bidang keamanan, tenaga outsourcing bidang kebersihan, tenaga outsourcing bidang tenaga boga dan tenaga outsourcing bidang pengemudi.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa keamanan kantor di RSUD Kota Surakarta dalam hal ini adalah PT. Alumada Artha Prima dengan Perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta dituangkan dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia jasa keamanan kantor periode 2017 dan 2018 yaitu PT. Alumada Artha Prima dengan perusahaan pengguna dalam hal ini RSUD Kota Surakarta. Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat hak dan kewajiban antara PT. Alumada Artha Prima dengan RSUD Kota Surakarta yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di RSUD Kota Surakarta.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian antara perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa tenaga keamanan kantor dalam hal ini PT. ALUMADA ARTHA PRIMA dengan perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta terdiri dari hak dan kewajiban PPK dan penyedia. PPK sebagai pihak pengguna jasa memiliki hak dan kewajiban diantaranya adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, ketentuan peralatan dan bahan yang

disediakan oleh perusahaan pengguna untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya perjanjian penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi perusahaan pengguna.

Perusahaan penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian, berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak perusahaan pengguna untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak perusahaan pengguna, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia, melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam perjanjian, melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat, untuk biaya langsung non personil, penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat, atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi, penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan perjanjian penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan, selain itu dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya perusahaan pengguna dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai satu tahun setelah berakhirnya perjanjian. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan pihak

pengguna meliputi memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar, membuat subperjanjian dengan peraturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik perusahaan pengguna; mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik pengguna jasa. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya perjanjian harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada perusahaan pengguna. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian hak dan kewajiban tersebut dalam perjanjian kerja antara PT. Alumada Artha Prima dengan RSUD Kota Surakarta telah menerapkan asas keseimbangan sebagaimana telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tertulis dalam perjanjian.

Jika dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian berdasarkan hak-hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan dalam pasal 64 sampai pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan yang perlu untuk dibahas diantaranya ketentuan dalam pasal 64, mengenai pasal tersebut perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa keamanan kantor dalam hal ini PT. Alumada Artha Prima dengan perusahaan pengguna dalam hal ini RSUD Kota Surakarta telah dibuat secara tertulis sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa kebersihan kantor di RSUD Kota Surakarta dalam hal ini adalah PT. Karunia Mekar Sejati yang telah memenangkan lelang pada periode 2018 dengan perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PT. Karunia Mekar Sejati dengan RSUD Kota Surakarta. Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat hak dan kewajiban antara perusahaan penyedia dengan perusahaan pengguna jasa yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di RSUD Kota Surakarta.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian antara perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa kebersihan kantor dalam hal ini PT. KARUNIA MEKAR SEJATI dengan perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta terdiri dari hak dan kewajiban PPK dan penyedia. PPK sebagai pihak pengguna jasa memiliki hak dan

kewajiban diantaranya adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh perusahaan pengguna untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya perjanjian penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi perusahaan pengguna.

Perusahaan penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian, berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak perusahaan pengguna untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak perusahaan pengguna, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia, melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam perjanjian, melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat, untuk biaya langsung non personil, penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat, atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi, penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan perjanjian penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban

penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan, selain itu dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya perusahaan pengguna dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai satu tahun setelah berakhirnya perjanjian. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan pihak pengguna meliputi memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar, membuat subperjanjian dengan peraturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik perusahaan pengguna; mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik pengguna jasa. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya perjanjian harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada perusahaan pengguna. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian hak dan kewajiban tersebut dalam perjanjian kerja antara PT. Karunia Mekar Sejati dengan RSUD Kota Surakarta telah menerapkan asas keseimbangan sebagaimana telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tertulis dalam perjanjian.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa tenaga Boga di RSUD Kota Surakarta dalam hal ini adalah PT. Makmur Jaya Sragen yang telah memenangkan lelang pada periode 2018 dengan pihak perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta dituangkan dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa. Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat hak dan kewajiban antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pengguna jasa yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di RSUD Kota Surakarta.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian antara perusahaan penyedia jasa paket pekerjaan pengadaan jasa tenaga boga dalam hal ini PT. MAKMUR JAYA SRAGEN dengan perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta terdiri dari hak dan kewajiban PPK dan penyedia. PPK sebagai pihak pengguna jasa memiliki hak dan kewajiban diantaranya adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,

meminta laporan-laporran secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh perusahaan pengguna untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya perjanjian penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi perusahaan pengguna.

Perusahaan penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian, berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak perusahaan pengguna untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak perusahaan pengguna, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia, melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam perjanjian, melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat, untuk biaya langsung non personil, penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat, atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi, penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan perjanjian penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan keuangan adalah

ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan, selain itu dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya perusahaan pengguna dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai satu tahun setelah berakhirnya perjanjian. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan pihak pengguna meliputi memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar, membuat subperjanjian dengan peraturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik perusahaan pengguna; mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik pengguna jasa. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya perjanjian harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada perusahaan pengguna. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan diantaranya :

- 4.1.1 Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerja sistem outsourcing di RSUD Kota Surakarta, untuk pelaksanaan perjanjian kerja sistem outsourcing di RSUD Kota Surakarta telah sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian penyerahan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing telah dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk pelaksanaan sistem outsourcing sebagaimana pasal 66 ayat (1) pelaksanaan outsourcing di RSUD Kota Surakarta digunakan dalam bidang jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa tenaga boga, jasa pengemudi dan jasa laundry, berbagai bidang jasa tersebut merupakan jasa penunjang namun berhubungan langsung dengan proses produksi sehingga pelaksanaan outsourcing di RSUD Kota Surakarta tidak sesuai dengan aturan pasal tersebut sebagaimana merupakan syarat pelaksanaan outsourcing penyedia jasa pekerja di Indonesia. Mengenai pasal 66 ayat (2) pelaksanaan outsourcing di RSUD Kota Surakarta dilaksanakan dengan sistem lelang tiap tahun

dan dengan pembaruan perjanjian kerja setiap tahunnya pada akhir masa perjanjian selama lebih dari 5x masa kerja sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

- 4.1.2 Bahwa penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa di RSUD Kota Surakarta bidang keamanan telah menerapkan asas keseimbangan sebagaimana telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tertulis dalam perjanjian. Mengenai pasal 66 ayat (2) perjanjian kerja telah dibuat secara tertulis oleh para pihak dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja keamanan dengan PT. Alumada Artha Prima, sedangkan mengenai ketentuan dalam pasal 59 tidak terpenuhi maka dalam hal ini seharusnya hubungan kerja antara pekerja outsourcing keamanan RSUD Kota Surakarta dan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Alumada Artha Prima beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja yaitu RSUD Kota Surakarta. Mengenai penerapan asas keseimbangan dalam bidang kebersihan telah menerapkan asas keseimbangan sebagaimana telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tertulis dalam perjanjian. Namun bagaimanapun perjanjian tertulis ini baru ada setelah penulis melakukan penelitian di PT. Karunia Mekar Sejati, sebelum penulis melakukan penelitian, pihak manajemen PT. Karunia Mekar Sejati tidak membuat perjanjian tertulis antara pekerja outsourcing kebersihan kantor di RSUD Kota Surakarta dengan pihak PT. Karunia Mekar Sejati yang menguraikan secara tertulis hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan penyedia dalam hal ini PT. Karunia Mekar Sejati. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dilaksanakan tanpa adanya dasar tertulis yang dibuat oleh PT. Karunia Mekar Sejati. Mengenai penerapan asas keseimbangan dalam bidang tenaga boga tidak terdapat perjanjian kerja tertulis antara pekerja outsourcing dengan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen, mengenai gaji, fasilitas seragam, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing. Mengenai penerapan asas keseimbangan dalam bidang pengemudi tidak terdapat perjanjian tertulis antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen, mengenai gaji, fasilitas seragam, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan asas keseimbangan dalam perjanjian.

4.1.3 Bahwa penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pengguna jasa di RSUD Kota Surakarta dilaksanakan pada bidang keamanan, bidang kebersihan, bidang tata boga dan bidang pengemudi. Untuk penerapan asas keseimbangan bidang keamanan oleh PT. Alumada Artha Prima, bidang tenaga boga oleh PT. Makmur Jaya Sragen, bidang kebersihan oleh PT. Karunia Mekar Sejati, bidang tenaga pengemudi oleh PT. Makmur Jaya Sragen dengan RSUD Kota Surakarta telah menerapkan asas keseimbangan sebagaimana telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tertulis dalam perjanjian. Mengenai pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa keamanan kantor dalam hal ini PT. Alumada Artha Prima, jasa kebersihan kantor dalam hal ini PT. Karunia Meka Sejati, jasa tenaga boga dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen dan Jasa Pengemudi dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen dengan perusahaan pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta telah dibuat secara tertulis sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut. Mengenai pasal 66 ayat (1) dalam hal ini paket pekerjaan sebagai tenaga keamanan kantor merupakan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi namun keamanan merupakan aspek pokok yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proses produksi maka semestinya tenaga keamanan di RSUD tidak dialihkan kepada perusahaan lain dalam hal ini perusahaan penyedia jasa outsourcing tetapi langsung terdapat perjanjian kerja dengan manajemen Rumah Sakit sebagai perusahaan pengguna pada saat ini karena tenaga keamanan di rumah sakit harus mempunyai keahlian – keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh tenaga keamanan di tempat lain dan berhubungan langsung dengan proses produksi, begitu pula tenaga kebersihan, tenaga boga dan pengemudi. Mengenai ketentuan pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga boga dan tenaga pengemudi di RSUD Kota Surakarta karena berkedudukan sebagai tenaga outsourcing maka mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa, namun terbatas pada perjanjian formil karena pihak penyedia jasa tidak secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap karyawan outsourcing yang ditempatkan di RSUD Kota Surakarta. Mengenai pasal 66 ayat (2) huruf b untuk tenaga keamanan dan tenaga kebersihan perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu secara tertulis namun tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana pasal 59 maka berdasarkan pasal 66 ayat (4) maka

seharusnya hubungan kerja beralihdari antara pekerja dengan perusahaan penyedia dalam hal ini PT. Alumada Artha Prima menjadi antara pekerja dengan pihak pengguna atau pemberi kerja dalam hal ini RSUD Kota Surakarta. Untuk tenaga boga dan tenaga pengemudi tidak dibuat secara tertulis maka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (2) huruf b maka berdasarkan pasal 66 ayat (4) seharusnya hubungan kerja beralih dari antara pekerja dengan perusahaan penyedia menjadi antara pekerja dengan pihak pengguna dalam hal ini RSUD Kota Surakarta. Mengenai pasal 66 ayat (2) huruf c untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga boga dan tenaga pengemudi dikelola oleh perusahaan penyedia sebagaimana ketentuan yang mengatur. Mengenai pasal 66 ayat (2) huruf d untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga boga dan tenaga pengemudi perjanjian dibuat secara tertulis antara perusahaan pengguna dengan perusahaan penyedia jasa. Mengenai pasal 66 ayat (3) untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga boga dan pengemudi dibuktikan pada isi perjanjian yang telah dicantumkan diatas bahwa pihak penyedia jasa diwakili oleh Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT berdasarkan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris. Dengan adanya akta tersebut berarti perusahaan penyedia jasa telah terdaftar sebagai badan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Mengenai pasal 66 ayat (4) berdasarkan ketentuan tersebut sudah semestinya demi hukum hubungan kerja antara pekerja outsourcing keamanan, pekerja outsourcing Kebersihan, pekerja outsourcing tenaga boga dan pekerja outsourcing tenaga pengemudi beralih dari antara pekerja dengan perusahaan penyedia menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pihak pengguna jasa atau pemberi kerja dalam hal ini RSUD Kota Surakarta.

Berdasarkan asas keseimbangan dalam perspektif hukum Islam perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan baik kesimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko maka berdasarkan praktik outsourcing di RSUD Kota Surakarta belum menerapkan asas keseimbangan dalam perspektif hukum Islam karena belum ada keseimbangan antara yang dilakukan oleh pekerja dan apa yang diterima oleh pekerja baik berupa fasilitas, gaji, kesejahteraan maupun jenjang karier serta dalam keseimbangan memikul resiko juga belum diterapkan karena dalam hal ini hanya pekerja yang menanggung resiko atas pekerjaannya yang berhubungan langsung dengan aspek produksi RSUD Kota Surakarta misalnya resiko penularan virus, resiko pemberhentian hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya pesangon, dan lain sebagainya. Berdasarkan situasi

tersebut sesuai dengan asas keseimbangan dalam perspektif hukum Islam maka demi hukum hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pengguna dalam hal ini RSUD Kota Surakarta.

4.2 Saran

- 4.2.1 Dalam memberlakukan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan mengenai dampak negatif dan positif dari sistem outsourcing itu sendiri terlebih untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia
- 4.2.2 Pemberlakuan sistem outsourcing di Indonesia tidak dibarengi dengan aturan hukum yang jelas dan lengkap sehingga masih banyak terjadi multi tafsir yang cenderung merugikan pekerja dengan adanya kebijakan-kebijakan perusahaan outsourcing yang memanfaatkan celah kelemahan aturan hukum mengenai outsourcing di Indonesia. Mengenai sistem outsourcing yang dibedakan menjadi bentuk pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja, hanya diatur dengan masing-masing satu pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kelemahan aturan hukum tersebut menciptakan banyak pelanggaran-pelanggaran praktik outsourcing yang cenderung merugikan pekerja sehingga menghambat perwujudan tujuan negara yaitu adanya kesejahteraan sosial.
- 4.2.3 Berkaitan dengan semakin merambahnya praktek outsourcing di Indonesia dan semakin banyaknya perusahaan outsourcing di Indonesia serta semakin banyaknya pelanggaran terhadap praktik outsourcing sudah semestinya sistem outsourcing dihapuskan demi terciptanya kesejahteraan sosial dimana seluruh pekerja outsourcing beralih hubungan kerja dari antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa atau perusahaan pemberi kerja secara langsung agar tidak terdapat determinasi dalam hal hak untuk kesejahteraan pekerja untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Karena pada dasarnya setiap manusia dalam hal ini pekerja berhak atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian hak kesejahteraan terhadap pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. (2008) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimyati, Khuzdaifah dan Kelik Wardiono. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ibrahim, Jhonny. (2006). *Teori dan Metodologi Peneliian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismatullah, Dedi. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Miru, Ahmadi. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman dan Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Yasar, Iftida (2008). *Sukses Implementasi Outsourcing*, Jakarta: PPM